



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT SUDJATMIKO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
3. NHK : 422655

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 346.177.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/84 m2 di KOTA BENGKULU ,
HASIL SENDIRI Rp. 139.172.000
2. Tanah Seluas 598 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. Tanah Seluas 915 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
18.300.000
4. Tanah Seluas 780 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
15.600.000
5. Tanah Seluas 295 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
30.385.000
6. Tanah Seluas 560 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
57.680.000
7. Tanah Seluas 680 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
70.040.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 97.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG LF 82 SUPER/MINIBUS Tahun 2003,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 78.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 127.772.072**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.166.518
Sub Total	Rp.	664.115.590
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	664.115.590

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.